

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI MAKAM
KECAMATAN BAHTIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

OLEH :

MAYANG PUSPITA SARI

208520007



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI MAKAM
KECAMATAN BAHTIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

MAYANG PUSPITA SARI
NPM : 208520007

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MAYANG PUSPITA SARI
NPM : 208520007
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) Di DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BAHTIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Disetujui oleh,

Pembimbing



Marlina Deliana, S. AB, M. AB

Dekan



Dr. Wahid Musthafa S., S.Sos., M.IP

Ketua Program Studi



Fitria Muda, M. AP

Tanggal Lulus : 28 Agustus 2024

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan saksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 september 2024



Mayang Puspta sari
208520007

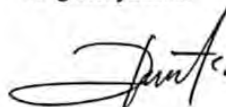
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Puspita Sari
NPM : 208520007
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Kota Medan
Pada tanggal :
12 september 2024
Yang menyatakan



(Mayang Puspita Sari)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Program BPNT setiap bulannya. Kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah. Hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya, sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT sering kali tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 indikator yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang digunakan yaitu survey deskriptif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 Perangkat desa dan 3 masyarakat penerima bantuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program BPNT Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis diketahui berada pada kategori belum maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program BPNT. Karena itu disarankan kepada Perangkat Desa untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program BPNT ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program, Bantuan, Pangan, Non Tunai.

ABSTRACT

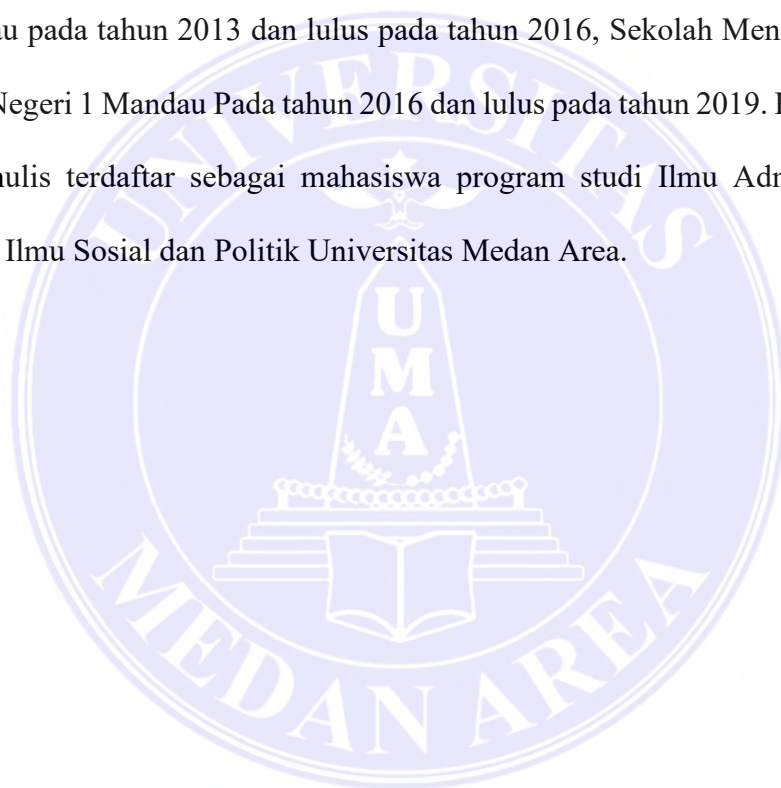
This research aimed to assess the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Balai Makam Village, Bahtin Solapan District, Bengkalis Regency. This program emerged due to considerations from the Bengkalis Regency government regarding the poor community that do not receive BPNT each month. There was a lack of coordination between the BPNT implementation officers and the beneficiaries, resulting in issues with the data on recipients of non-cash food assistance from year to year. This problem was caused by the failure to update the list of names annually, while some individuals had passed away or moved, among other reasons. The implementing officers did not fully understand their roles in managing BPNT, leading to frequent misallocation of assistance. This research utilized Edward III's theory, which comprises four indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research type employed was descriptive survey with a qualitative method. The informants in this research consisted of six individuals, including three village officials and three beneficiaries. The data collection technique used in this research was interviews. The results regarding the implementation of the BPNT program in Balai Makam Village, Bahtin Solapan District, Bengkalis Regency indicated that it was categorized as not yet optimal. The inhibiting factor identified was the significant number of community members unaware of information regarding the implementation of the BPNT program. Therefore, it was recommended that village officials provide comprehensive socialization to the community about the implementation of this BPNT program.

Keywords: *Implementation, Policy, Program, Assistance, Non-Cash Food.*



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Mayang Puspita Sari, Lahir di dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Pada hari kamis Tanggal 04 januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Suetno Dan Sartini. Pendidikan formal yang ditempuh adalah memasuki sekolah dasar (SD) Negeri 56 Balai Makam pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Mandau pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mandau Pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT. Karena atas segala karunia-nya sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis”. Terima Kasih penulis sampaikan kepada ibu Marlina Deliana,S.AB,M.AB selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr .Indra Muda, M.AP selaku Kaprodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan saran.

Terima Kasih untuk kedua orang tua yaitu Bapak Suyetno dan Ibu Sartini yang telah mendukung, memberi fasilitas dan selalu mendoakan pada setiap Langkah saya. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik maupun masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 12 september 2024

Mayang Puspita Sari
208520007

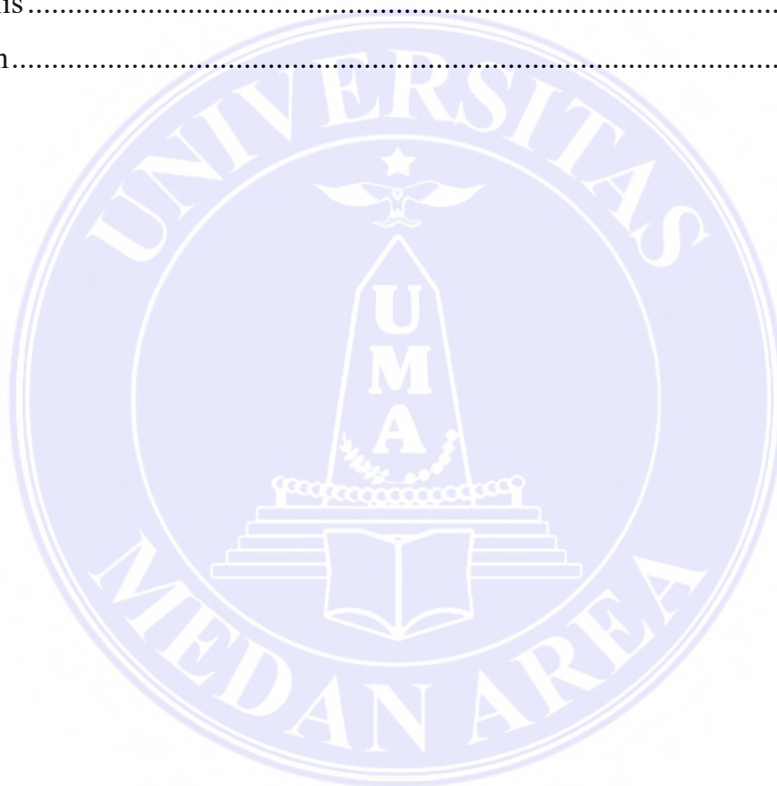
DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 9 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 9 |
| 1.4.3 Manfaat Akademis | 10 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Teori Kebijakan Publik | 11 |
| 2.2. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan | 12 |
| 2.3. Model Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan | 16 |
| 2.5. Pengertian Desa..... | 17 |
| 2.6 Bantuan Pangan Non Tunai | 18 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 2.8 Kerangka Berpikir | 31 |
| III. METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian | 33 |
| 3.1.2 Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3 Informan Penelitian | 35 |
| 3.4 Teknik Penarikan Informan | 37 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 38 |
| 3.8 Waktu Penelitian | 40 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Hasil Deskriptif Penelitian | 42 |
| 4.1.1 Gambaran Desa balai makam..... | 42 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Desa Balai Makam | 43 |
| 4.1.3 Stuktur Organisasi Desa Balai Makam | 44 |
| 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Desa Balai Makam | 46 |
| 4.2. Pembahasan..... | 48 |
| 4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Berdasarkan Teori G.Edward III..... | 48 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 70 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 70 |
| 5.2 Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | 75 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Jumlah Rumah Tangga Fakir Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 | 4 |
| 2. Jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Desa balai makam Kecamatan bahtin solapan Kabupaten Bengkalis | 6 |
| 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang | 27 |
| 4. Informan Penelitian Yang Ada Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis | 36 |
| 5. Waktu Penelitian | 56 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Mekanisme Pelaksanaan BPNT..... | 5 |
| 2. Kerangka Berfikir..... | 31 |
| 3. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif..... | 39 |
| 4. Kantor Desa Balai Makam | 43 |
| 5. Struktur Organisasi Desa | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pedoman Observasi | 75 |
| 2. Pedoman Wawancara | 68 |
| 3. Pedoman Dokumentasi | 69 |
| 4. Informan Penelitian | 72 |
| 5. Surat Riset Lapangan..... | 77 |
| 6. Balasan Dari Kantor Desa Balai Makam | 78 |
| 7. Surat Keterangan Selesai Riset..... | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau sebuah keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dirinya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga kemudian seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat.

Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka. Sebagian orang memahami bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut badan pusat statistik, masyarakat dikatakan miskin yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000.

Penanggulangan kemiskinan merupakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hal ini di sadari

oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu di perlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus di lakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, lalu Pemerintah Indonesia sudah mengembangkan beberapa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan kemiskinan dan menanggulangi masalah kemiskinan. Berbagai program dilakukan untuk menunjang kemiskinan di Indonesia, dengan berbagai cara dilakukan oleh beberapa lembaga dan instansi pemerintah. Seperti memberi bantuan sosial di salurkan, salah satunya bantuan pangan non tunai. Ditegaskan dalam perpres ini, penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud. Menurut perpres ini, dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN).

Peran strategis yang di lakukan pemerintah harus di lakukan dalam batas-batas di mana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan di jalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin dan lebih khususnya lagi manfaatnya bagi masyarakat dan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat pusat sampai pada individu masyarakat.

Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan

kebijakan-kebijakan aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Masalah kemiskinan dapat di tuntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin.

Namun seringkali kebijakan yang di buat justru kurang memihak kepada keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seorang yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan memiliki penetapan kebijakan dan srategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Tentunya sangat beralasan sekali untuk pemerintah mencanangkan serta memprogramkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal menangani masalah kemiskinan, pemerintah sudah bersungguh-sungguh mengurangi tingkat kemiskinan, salah-satunya ialah dengan adanya program bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini lebih populer dengan sebutan BPNT bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dengan pertimbangan bahwa penyaluran sosial kepada masyarakat dilakukan secara efesien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang efesien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada 12 juli 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai banyak tidak tepat sasaran, bantuan di salurkan tidak pada orang yang membutuhkan, penyalurn yang kurang efektif kurangnya pengontrolan sehingga bantuan diberikan bukan pada sasarannya, sehingga tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program bantuan pangan non tunai dilakukan, salah satunya di desa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis provinsi riau. Di desa balai makam tersebut juga masih belum teapat sasaran, menurut salah seorang warga dari hasil pengamatan sementara mengatakan bahwa bantuan non tunai di desa balai makam belum tepat sasaran, seperti beras, gula, minyak goreng, dan ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kecukupan secara materil akan tetapi dapan bantuan tersebut, bantuan juga di salurkan kepada keluarga terdekat walaupun keluarga itu tergolong mampu secara ekonomi. Adapun jumlah masyarakat miskin di desa balai makam dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Fakir Miskin di desa balai makam Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

| No | Desa Balai Makam | Rumah tangga fakir miskin | | | |
|-------|------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Sangat miskin | Hampir miskin | Miskin | Sedikit miskin |
| 1 | 2018 | 210 | 205 | 324 | 177 |
| 2 | 2019 | 199 | 201 | 180 | 403 |
| 3 | 2020 | 350 | 107 | 128 | 195 |
| 4 | 2021 | 380 | 138 | 317 | 369 |
| 5 | 2022 | 360 | 270 | 394 | 201 |
| Total | | 1.449 | 921 | 1.343 | 1.345 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang sangat miskin di desa Balai Makam masih sangat banyak dari jumlah penduduk yang sedikit miskin . Maka pemerintah Desa Balai Makam perlu mengambil kebijakan untuk melaksanakan program (BPNT) untuk masyarakat miskin kabupaten bengkalis.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah kode belanja beras untuk masyarakat miskin berubah menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT), namun dalam pelaksanaannya tetap merujuk pada peraturan bupati Bengkalis nomor 72 tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Bantuan Pangan Non Tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah daerah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan BPNT
MEKANISME PENYALURAN BANSOS PANGAN



**Tabel 2 Jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Desa balai makam
Kecamatan bahtin solapan KabupatenBengkalis**

| No | Desa Balai Makam | Jumlah KPM |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2018 | 820 |
| 2 | 2019 | 793 |
| 3 | 2020 | 421 |
| 4 | 2021 | 1.189 |
| 5 | 2022 | 1.195 |
| Total | | 4.418 |

Sumber : sekretariat daerah kabupaten bengkalis

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah keluarga penerima bantuan di desa balai makam berjumlah 4.418 KK, Tahun 2022 yang paling banyak menerima bantuan pangan non tunai adalah yang berjumlah 1.195 KK sedangkan yang paling sedikit di tahun 2020 merupakan tahun jumlah paling sedikit yaitu 421 KK. Namun dalam penelitian ini, peneliti menetapkan di desa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis sebagai lokasi penelitian.

Alasan dipilihnya desa balai makam sebagai lokasi penelitian karena seharusnya di desa balai makam implementasi kebijakan program BPNT seharusnya lebih baik di bandingkan dengan desa lainnya yang ada di kecamatan bahtin solapan.

Sehingga para penerima bantuan pangan non tunai ini benar-benar dapat membantu Rumah Tangga Miskin (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bengkalis dengan membuat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini tidak semata-mata berjalan dengan lancar, namun pada kenyataannya dalam pendistribusian program ini banyak terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adapun permasalahan dalam implementasi bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara petugas pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya.
2. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran.
3. Tahun 2019 bantuan pangan non tunai diganti menggunakan kartu, dan penerima kartu yang bisa ambil di warung yang ditunjuk dinas sosial, permasalahannya kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yang diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yang terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut

kependudukan di dinas catatan sipil.

4. Belum ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaan BPNT di Kabupaten Bengkalis, sehingga pelaksanaan kegiatan hanya menunggu edaran dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mencapai kelancaran dalam program bantuan pangan non tunai ini tergantung dari aparatur pengelola program bantuan beras non tunai ini dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh aparatpemerintahan kabupaten bengkalis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan Judul“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa balai makam Kecamatan bahtin solapan Kabupaten Bengkalis.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin solapan Kabupaten bengkalis?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin solapan Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin solapan Kabupaten bengkalis

2. Untuk mengetahui permasalahan hambatan dalam implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung bagi kebijakan kepastakaan ilmu administrasi publik bagi para penulis lainnya yang ingin meneliti hal yang sama.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk melatih, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah serta sistematis dan metodologi penulisan dalam penyusunan suatu karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari ilmu administrasi publik.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam hal pengambilan keputusan maupun prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan agar suatu keputusan tersebut dapat membawa hasil yang memuaskan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi yang terkait terkhususnya bagi instansi tempat penelitian ini dilakukan agar dapat melaksanakan program alokasi dana desa dengan sebaik mungkin.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang apa saja yang perlu

dibenahi dalam instansi yang terkait.

1.4.3 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai suatu media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya ingin meneliti hal sama, yakni mengenai cara berkomunikasi dan strategi *public relations*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan hanya dalam arti menyangkut government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik yakni masyarakat atau warga Negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Preweitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:60) dalam perspektif mereka mendefenisikan keputusan tetap yang didirikan dengan konsistensi dan pengulangan(repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun menurut Carl Friedrich, 1969 dalam Agustino (2006:7) yang menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan dan kemungkinan kemungkina kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis 2005 dalam Edi Suharto (2007-3) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung penertian mengenai "*whatever government choosed or not to do*" Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 dalam Edi Suharto (2007-4)

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil tertentu ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau dominan pemerintah saja.

2.2. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation" "berasal dari kata "to implement". Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2008:23), kata to implement berasal dari bahasa Latin "implementum" dari asal kata impere dan plere Kata "implere" dimaksudkan "to fill up": "to fill in" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill" yaitu mengisi Selanjutnya kata "to implement" dimaksudkan sebagai : "(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling to give practical effect to (3) to provide or equip with implements" (Webster's Dictionary, dalam Tachjan, 2008-23). Pertama, "to implement" dimaksudkan "membawa kesuatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu" Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat". Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok.

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Winarno (2002: 29), mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program".

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan

(*spillover/negatif effects*)

2.3. Model Implementasi Kebijakan

a) Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi; Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi karena komunikasi mensyaratkan agar implementor dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Oleh karena itu jika tujuan dan sasaran implementasi tidak jelas maka akan menimbulkan resistensi dari pihak kelompok sasaran. Dalam hal ini juga akan mengamati kejelasan kebijakan sosialisasi alokasi dana desa dari para pelaksana.

2. Sumberdaya

Sumberdaya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan karena walaupun sebuah kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumberdaya melaksanakan suatu implementasi maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya merupakan suatu faktor penting dalam implementasi agar berjalan secara efektif. Karena jika tidak adanya sumberdaya dalam suatu implementasi maka suatu kebijakan hanyalah

suatu kertas dalam bentuk dokumen saja. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor dan dan sumberdaya financial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

b) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam (Sumarsono, 2009: 99) dipengaruhi dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)

1. Variable isi kebijakan (*content of policy*) ini mencakup:

- a. Sejauh mana kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan
- d. Apakah letak suatu program sudah tepat

- e. Apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan
 - f. Apakah suatu program sudah didukung oleh sumberdaya yang memadai
2. Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*) mencakup :
- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - b. Karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

2.4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana
- b. tersedia waktu dan sumber daya
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan

kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan. derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

2.5. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *'a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan demikian, kepala desa langsung dibawah pembinaan bupati atau wali kota. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan UU No. 32/2004 kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi yang membawahi desa-desa, melainkan hanyalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau dapat disebut sebagai perpanjangan tangan kabupaten

Bayu Suryaningrat menyimpulkan bahwa desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, bahkan murni bersifat Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal sistem sistem pemerintahan didaerah, dan yang sekarang menjadi hakekat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu hak otonom atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pasal 19 pada

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan tentang kewenangan desa yang meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala Desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dititik-beratkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang reponsif Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa diwujudkan dengan adanya pembentukan tala tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan pemerintah desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

2.6 Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha

kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen lakun pandai, agen layanan keuangan digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh masyarakat biasa disebut dengan e-warung, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya.

Untuk setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan memiliki Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan program, fungsi dari kartu keluarga sejahtera (KKS) berfungsi sebagai alat untuk menukar bantuan.

Sistematis alur dalam program BPNT ini yakni, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdapat di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu padatahun 2015, akan mendapatkan kartu KKS, yang kartu tersebut akan terisi saldo sebesar Rp 200.000,- untuk dibenjakkan atau ditukarkan dengan bahan-bahan pangan di e-warung (outlet) yang telah tetapkan sebelumnya.

1. Dasar Hukum BPNT

- a. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- b. Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 terkait strategi nasional inklusif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/ PMK.05/2015 terkait belanja

bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga.

- d. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 228/PMK.05/2016 terkait perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/PMK.05/2015 mengenai Belanja bantuan sosial pada Kementerian atau Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 terkait program Keluarga Harapan.
- f. Arahan Presiden RI pada 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017 dalam forum Rapat terbatas tentang pengalihan bantuan dan subsidi dilakukan secara non tunai.

2. Manfaat dan Tujuan Program BPNT

Adapun manfaat dan tujuan program BPNT yang tersusun dalam buku pedoman umum program bantuan pangan non tunai, ialah sebagai berikut:

1. Tujuan BPNT

- a. Meningkatkan gizi masyarakat yang telah terdaftar menjadi KPM.
- b. Memberikan kelonggaran untuk memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan oleh KPM sendiri.
- c. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- d. E-warong mendapatkan kebebasan untuk membeli pasokan bahan pangan dari berbagai tempat, sehingga mendapatkan ruang pemasok dengan lebih optimal.
- e. Bank penyalur hanya bertugas untuk menyalurkan dana bantuan ke kartu rekening penerima, dan tidak berhak mendistribusikan bantuan bahan pangan kepada KPM.

2. Penerima Manfaat Program BPNT

Penerima BPNT ialah seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Kriteria pemilihan seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program BPNT ini ialah berdasarkan dengan tolak ukur 25% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah dari daerah pelaksana program. Sumber data daftar penerima bantuan dari program BPNT telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015.

DT-PPFM ini dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin, yang dibentuk melalui surat keputusan Menteri Sosial NO. 284/HUK/2016 pada tanggal 21 September 2016. Kelompok kerja pemutakhiran data terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

3. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai

Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- yang ditransfer setiap bulan oleh Bank HIMBARA melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan dapat digunakan untuk membeli atau ditukar dengan bahan pangan yang telah disediakan oleh agen yang telah berkerja sama dengan program BPNT, bahan pangan tersebut seperti beras, gula, telur, minyak ataupun tepung. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BPNT ini

dipilih berdasarkan tujuan peningkatan nilai gizi dan nutrisi KPM, maka untuk pemilihan komoditi bahan pangan ini dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan KPM.

Apabila dana bantuan pada bulan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam periode waktu satu bulan tersebut, maka nilai saldo dana bantuan tersebut akan secara langsung tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik yang terhimpun pada kartu KKS keluarga penerima manfaat yang terkait dan dapat digunakan pada bulan berikutnya.

4. Mekanisme Program BPNT

a. Tahap persiapan program

Tahap persiapan merupakan proses paling awal dari pendistribusian BPNT setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT. Dalam tahap persiapan program BPNT maka dilaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan, koordinasi ini meliputi koordinasi di tingkat pemerintah pusat, di tingkat pemerintah provinsi dan di tingkat pemerintah kota atau kabupaten.

Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat juga melibatkan bank penyalur bantuan pangan dengan bentuk kegiatan pembukaan rekening penerima bantuan sosial, memastikan jumlah dan sebaran e-warong, serta kesepakatan proses penyaluran yang melibatkan Bank Penyaluran.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam penyelenggaraan suatu program baru maka perlu adanya kegiatan pengenalan serta pengetahuan mengenai seluk beluk dari suatu program maka dilaksanakannya program edukasi dan sosialisasi program BPNT sebagai langkah awal untuk mengenalkan BPNT kepada pihak-pihak terkait.

Sasaran dari kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPNT meliputi

kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah termasuk juga tim koordinasi Bansos pangan pada tingkat daerah, organisasi perangkat desa pada tingkat kecamatan, pendamping program BPNT, KPM (Keluarga Penerima Manfaat), pengelola usaha mikro (e-warung), serta bank penyalur bantuan.

Adapun materi dari kegiatan edukasi dan sosialisasi progra BPNT meliputi, kebijakan program BPNT, prinsip-prinsip BPNT, tata cara dan fungsi rekening bantuan sosial, manfaat BPNT, tata cara pelaporan masalah dalam BPNT, serta tujuan dan mekanisme BPNT.

c. Registrasi dan pembukaan rekening penerima kartu KKS

Pada proses registrasi dan pembukuan kartu KKS ini melalui 3 proses yakni, proses pertama, Bank penyalur bantuan melakukan registrasi secara kolektif berdasarkan data yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. proses ke dua, Bank Penyaluran melakukan distribusi kartu keluarga (KKS) yak telah dibukakan rekeningnya oleh Bank Penyalur Rakyat yang mencakup buku tabungan, kartu keluarga (KKS), dan petunjuk penggunaan kartu, serta proses ketiga yakni , Bank Penyalur melakukan laporan denga format baku antar bank dan dashboard program BPNT kepada pihak Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

d. Penyaluran

Dalam proses penyaluran BPNT akan melalui beberapa tahap yakni :

- 1) Bank penyaluran membukakan masing-masing akun elektornik untuk KPM berdasarkan daftar KPM yang diterima dari kementerian sosial.
- 2) Bank penyalur bantuan melakukan pemindahan dana bantuan dari rekening kemetrian sosial kepada rekening Keluarga Penerima Bantuan.
- 3) Pemberian pemerintah oleh kementerian sosial kepada bendahara umum

negara atau daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan BPNT, kemudian bendahara umum negara atau daerah melakukan pencairan dana yang akan diserahkan kepada kementerian sosial di bank penyalur BPNT.

- 4) Bank penyalur menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait dana bantuan yang telah di transfer kepada KPM program BPNT.

5. Efektifitas pelaksanaan program

Untuk melihat keterlaksanaan program dengan efektif maka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a. Aspek tepat sasaran.
- b. Aspek tepat jumlah.
- c. Aspek tepat harga.
- d. Aspek tepat waktu.
- e. Aspek tepat kualitas.
- f. Aspek tepat administrasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, yang memiliki relevansi dan keterkaitan topik. Pada penelitian ini mengacu pada penelitian Tesis yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo oleh Eko Yudianto Yunus (2019).

Dalam penelitian ini Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga

miskin, masing - masing keluarga menerima bantuan Rp 110.000,-. Peneliti mengambil lokus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Pada implementasi kebijakan bantuan BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi orisinalitas dari masing-masing penelitian.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yaitu Bantuan Pangan Non Tunai dan juga pada metode penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif serta variable penelitian yaitu Implementasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada indikator penelitian, pada penelitian terdahulu indikatornya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Edward

III. Dan perbedaan terdapat pula pada locus dan waktu penelitian sehingga

penelitian ini sangat perlu dilakukan terkait dengan perkembangan ilmu

pengetahuan.

Pada prinsipnya penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya namun melakukan pengembangan sekaligus melanjutkan penelitian sebelumnya melalui implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai. Untuk lebih memahami, berikut diklasifikasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dengan menggunakan tabel.



Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil | Persamaan dan Perbedaan |
|----|--|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Eko Yudianto Yunus (2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Jurnal Reformasi Vol 9 No. 2 (2019) | Implementasi | Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat. | Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan Perbedaan penelitian terletak Pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian. |
| 2 | Wiwit, Tri Sulistyaningsih dan Muhammad Kamil (2020) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13 Nomor 1 Januari 2020. | Monitoring dan evaluasi kebijakan | Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu. | Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian. |

| No | Nama dan judul penelitian | Variabel | Hasil | Persamaan dan perbedaan |
|----|--|--------------|--|--|
| 3. | <p>Ishak Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri (2020)</p> <p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)</p> <p>Social Work Jurnal Vol 9 No. 2 Hal. 122-129</p> | Implementasi | <p>Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sasaran dan prasarana penyaluran non tunai. Serta mulaitahun 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial non tunai. Sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di kabupaten dan kota disalurkan dalam bentuk non tunai walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sementara di beberapa daerah masih menyalurkan Rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).</p> | <p>Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p> |

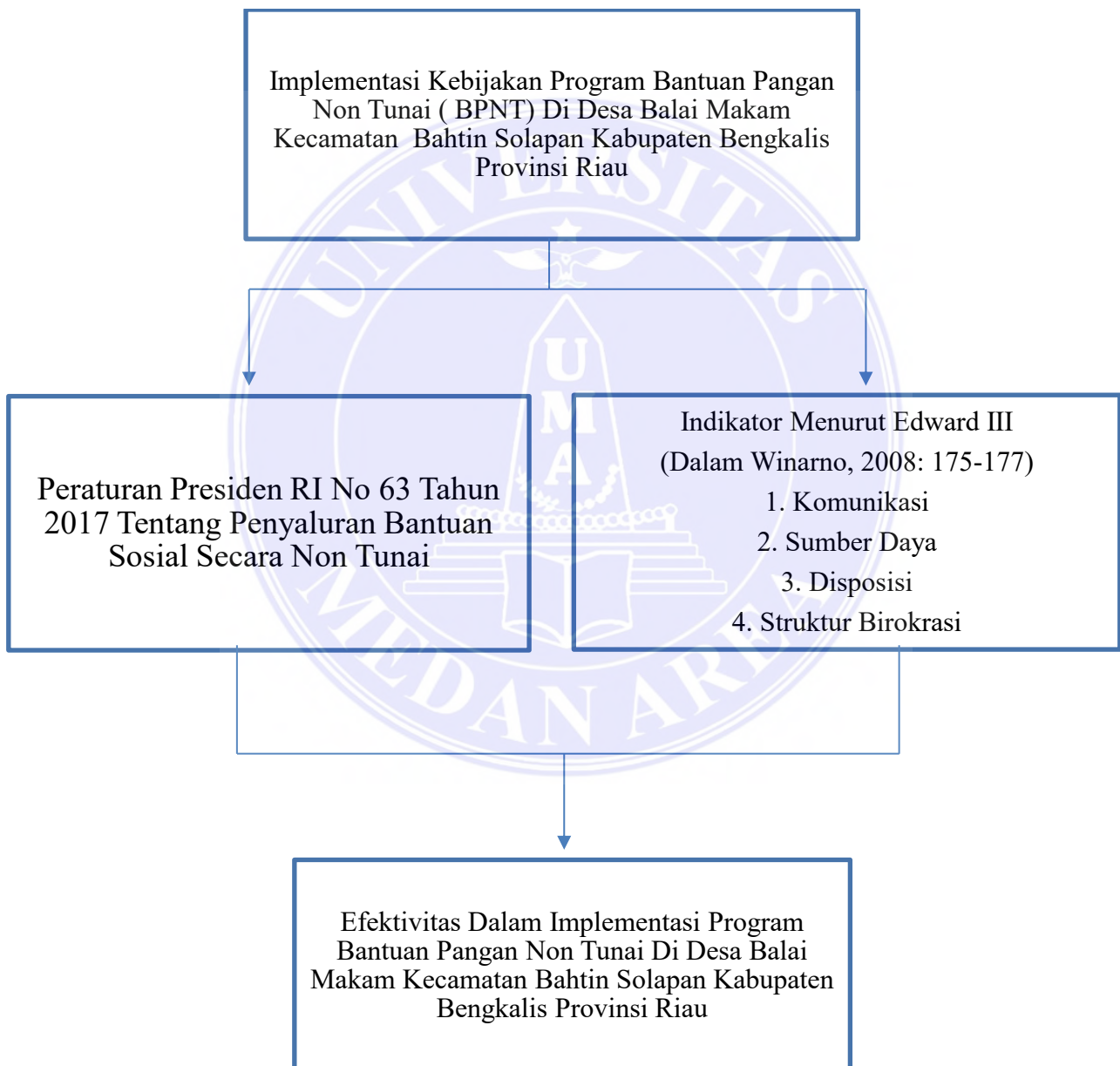
| No | Nama dan judul penelitian | Variabel | Hasil | Persamaan dan perbedaan |
|----|--|-------------------------|---|--|
| 4. | <p>Benny rachman,adang agustian dan wahyudi (2018)</p> <p>Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program beras sejahtera (rasta) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)</p> <p>Jurnal analisis kebijakan pertanian vol 16 no 1 juni 2018 : 1 -18.</p> | Efektivitas pelaksanaan | <p>Hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan rasta dan BPNT kedepan lebih baik, untuk itu ada beberapa hal yang perlu di lakukan yaitu :</p> <p>(1) sosialisasi dan pengawasan dalam penentuan KPM; (2) pemutakhiran basis data terpadu yang di gunakan sebagai dasar untuk menetapkan KPM; (3) membuat aturan jelas tentang titik distribusi bulog ke KPM; (4) meningkatkan pelibatan peran pemerintah daerah dari titik distribusi bulog ke KPM; (5) pengawasan pelaksanaan penyaluran rastra dari titik distribusi bulog sampai ke KPM; (6) melakukan pengecekan di lokasi akhir titik distribusi (warung desa atau kelurahan atau ketua RT setempat) terhadap beras sebelum di serahkan kepada KPM; (7) penambahan jumlah dan sebaran e-warong, dan (8) fasilitas signal GPRS yang memadai dari provider.</p> | <p>Persamaan penelitian terdapat pada jumlah variabel, metode penelitian dan objek penelitan yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel, indikator dan teknik analisis penelitian.</p> |

| No | Nama dan judul penelitian | Variabel | Hasil | Persamaan dan perbedaan |
|----|--|----------------------|---|--|
| 5. | <p>Azizah, akhmad nikhrawi hamdie dan muhammad uhaib as'ad. (2019)</p> <p>Implrmentasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui e- warong di kelurahan alalak selatan kecamatan banjarmasin utara kota ban-Jarmasin</p> | Implementasi program | <p>Hasil penelitian menunjukkan implementasi program bantuan pangan non tunai melalui e-warong di kelurahan alalak selatan kecamatan banjarmasin utara kota banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang tidak krusial tapi cukup berpengaruh dan ini masih perlu di perbaiki kedepannya agar program terus berkelanjutan.</p> | <p>Persamaan penelitan terdapat pada varia-bel,metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbe-daan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p> |

2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan semua teori diatas, kemudian peneliti membuat kerangka pemikiran untuk mendeskripsikan keterkaitan masalah penelitian dengan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis.

Gambar 2. Kerangka Berfikir



Dalam kerangka berpikir yang di buat penulis di sini menjelaskan bahwa pemerintah telah memberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang paling utama dalam proses implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai ini, serta perangkat desa bertanggung jawab penuh terhadap implementasi bantuan (BPNT) kemudian untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai di desa balai makam maka penelitian ini menggunakan teori george edward III, kemudian untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program bantuan pangan non tunai di desa tersebut, maka peneliti akan melihat dari hasil komunikasi, sumberdaya, desposisi, dan stuktur birokrasi.

setelah mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan program bantuan pangan non tunai serta faktor pengahambatnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan serta dapat memberikan masukan atau saran bagi perangkat desa tersebut agar implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di desa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis provinsi riau lebih baik kedepannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti akan membuat sebuah narasi terhadap semua data yang muncul dari hasil yang ditemukan peneliti pada masa penelitian. Penelitian ini menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai fakta – fakta yang ada dilapangan. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Pada metode penelitian deskriptif menurut moleong(2011), data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk

variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Dengan demikian dalam pengumpulan data dan informasi peneliti harus melewati proses wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat setempat untuk proses informasi dan efektifitas peangkat desa lewat keterangan kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa serta tokoh masyarakat dan sekretaris desa.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Topik atau fokus menurut Creswell (dalam Tresiana, 2013) merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik atau fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literatur, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.

Moleong (2011) menjeaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi -eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru di peroleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan. Oleh karena itu maka penelitian ini akan mengkaji hal-hal sebagai berikut :

a. Mengetahui implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkulu.

b. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi

kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih kantor Desa Balai Makam sebagai pelaksana bantuan pangan non tunai di kecamatan Bahtin Solapan. Adapun alasan peneliti mengambil kantor Desa Balai Makam dalam penelitian yaitu dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kecamatan Bahtin Solapan diantaranya usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah anggota dari kelompok yang berpartisipasi atau seorang partisipan yang terlibat langsung dalam pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena merekalah yang paling tahu atau berpartisipasi langsung. menurut Sugiyono (2010), informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Bendahara Desa, serta juga 3 orang Masyarakat.

**Tabel 4. Informan Penelitian Yang Ada Di Desa Balai Makam Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**

| No | Informan Penelitian | Jumlah | Keterangan |
|--------|--------------------------|--------|----------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | Informan kunci |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | Informan |
| 3 | Bendahara Desa | 1 | Informan |
| 4 | Masyarakat penerima BPNT | 1 | Informan |
| 5 | Masyarakat penerima BPNT | 1 | Informan |
| 6 | Masyarakat penerima BPNT | 1 | Informan |
| Jumlah | | 6 | |

Sumber : peneliti,2024

- Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Balai Makam yakni atas nama : Agus Har.
- Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam intraksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah,sekretaris desa dan bendahara desa yakni atas nama : Ade Saputra, S.I.P. Dan Lestina Simamora.
- Informan Tambahan merupakan siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang di duga dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti (sugiono,(2019 : 25). Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Balai Makam yakni atas nama : Ngadinem,Santini Dan Suyetno.

3.4 Teknik Penarikan Informan

Penulis menetapkan untuk menggunakan dua teknik dalam penarikan dan Teknik *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini ditujukan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, sedangkan untuk masyarakat penerima menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di balai makam kecamatan bahtin solapan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Peneliti akan menggunakan data primer sebagai data utama di dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dikemukakan. Dimana data ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai jawaban masalah dan ditemukan langsung oleh peneliti sewaktu melakukan penelitian dilapangan.

2. Data sekunder

Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang didapat oleh peneliti dari pihak lain serta dokumen-dokumen dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan jenis instrument sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Riduwan (2010), observasi yaitu melakukan pengamatan secara

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

2. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2010), dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian.

3. Wawancara

Menurut Riduwan (2010), wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara berstruktur bahwa pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

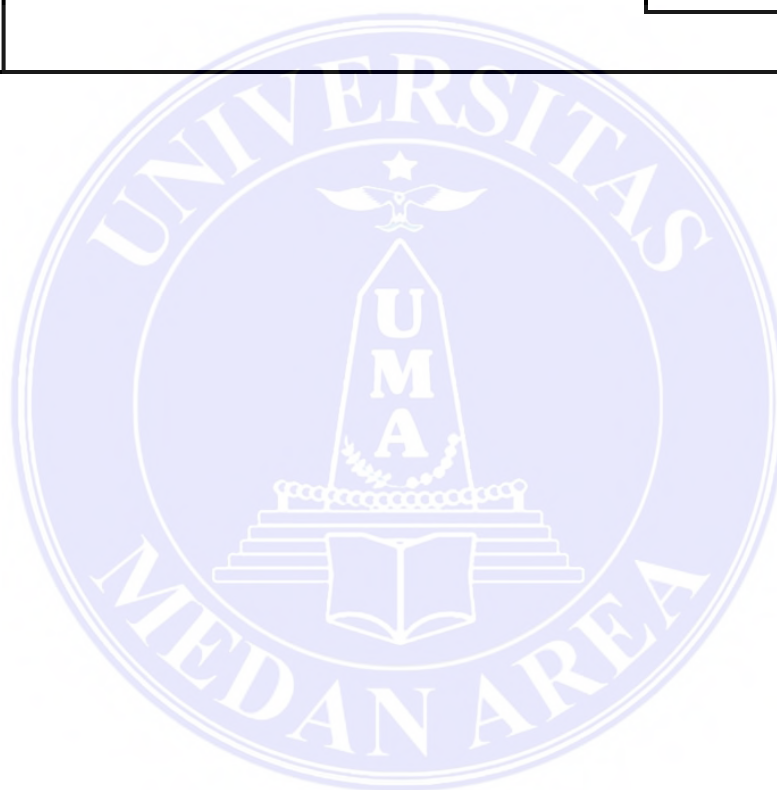
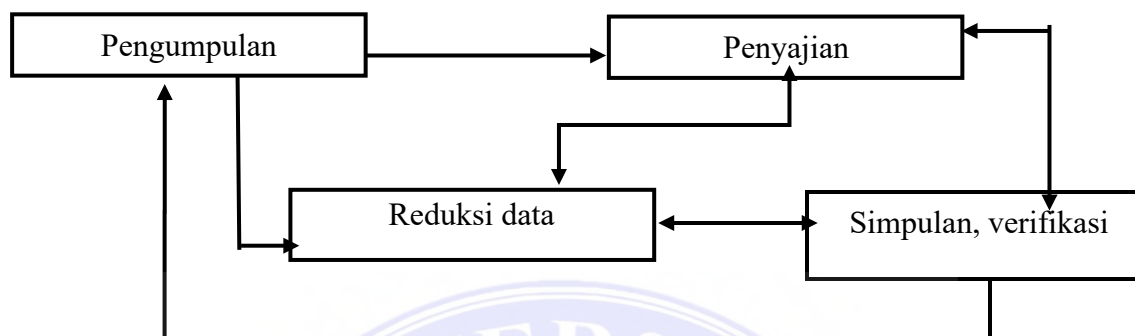
3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh yang bertujuan menghasilkan data yang akurat dari objek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Nazir (2011:346) menyebutkan Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan penelitian dilakukan

dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dilakukan dengan alur sebagaimanatergambar di bawah ini :

Gambar 3. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut Moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dalam penelitian ini, penulis melihat data-data dari lokasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah pengumpulan data, Penulis mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

3.8 Waktu Penelitian

Jadwal penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimulai pada Oktober 2023 sampai dengan Mei 2024 seperti rincian penggunaan waktu

perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 5. Waktu Penelitian

| No | Uraian | 2023 | | 2024 | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Jun | Jul | Agu | Sep |
| 1. | Pengajuan judul skripsi | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan seminar proposal | | | | | | | | | |
| 3. | Seminar proposal | | | | | | | | | |
| 4. | Perbaikan proposal | | | | | | | | | |
| 5. | Pengajuan surat penelitian | | | | | | | | | |
| 6. | Penelitian | | | | | | | | | |
| 7. | Penulisan hasil penelitian | | | | | | | | | |
| 8. | Bimbingan hasil penelitian | | | | | | | | | |
| 9. | Penyusunan seminar hasil | | | | | | | | | |
| 10. | Seminar hasil penelitian | | | | | | | | | |
| 11. | Perbaikan skripsi | | | | | | | | | |
| 12. | Sidang meja hijau skripsi | | | | | | | | | |

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis berada pada kategori belum maksimal berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, adapun uraian setiap indikator yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator komunikasi dalam implementasi program BPNT ini belum maksimal namun tetap harus ditingkatkan lagi, dari segi sumberdaya juga belum maksimal karena ketersediaan bahan sembako dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program BPNT yang belum memadai, pada disposisi juga masih dalam kategori belum maksimal dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program BPNT, pada indikator struktur birokrasi juga belum maksimal disebabkan karena sampai saat ini belum ada prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan BPNT.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator komunikasi masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi mengenai program BPNT. Pada indikator sumberdaya petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengolahan BPNT. Sehingga tidak tepat sasaran. Pada

indikator disposisi kurangnya koordinasi antara petugas pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat. Dan pada struktur birokrasi belum ada prosedur (SOP).

5.2 Saran

Adapun saran ataupun masukan yang ingin peneliti sekaligus penulis berikan kepada pemerintah desa tempat penulis melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan program BPNT desa balai makam yaitu, Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Bahtin Solapan baik itu dalam sosialisasi langsung dilapangan, maupun sosialisasi yang dilakukan dikelurahan serta memberikan spanduk terkait pelaksanaan program BPNT tersebut, sehingga masyarakat mengetahui adanya program tersebut di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan aktif menginput data mengenai KPM sehingga data tersebut sinkron dengan data KPM yang ada di pusat. Serta menambah jumlah e-warung di setiap kelurahan dan meningkatkan stok sembako di e-warung sehingga masyarakat sebagai KPM tidak perlu bersusah payah dalam memperoleh sembako di e-warung tersebut.
3. Pemerintah Kecamatan diharapkan untuk berkoordinasi aktif dengan stakeholders guna mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan program swakelola dan segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Serta diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk terus mengawasi dalam

pelaksanaan program BPNT sehingga tidak adalagi KPM yang salah sasaran serta keluarga miskin yang tidak memperoleh program BPNT tersebut.

4. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kecamatan Bahtin Solapan khususnya untuk menyediakan SOP dalam pelaksanaan program ABPNT di Kecamatan Bahtin Solapan, agar program tersebut dapat terlaksana secara sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aliza, N. (2022). *Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah*.
- Anarki, P. S. *Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*.
- Aspar, A., & Syakhrudin, D. N. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.
- Azwar. Widjaja. (2009). *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Bayu Suryaningrat. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.
- Budiarto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Hal 10.
- C.S.T. Kansil, Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 142).
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.
- Dema, Y. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Otonom Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Eko Yudianto, Y. (2019). *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. *Reformasi*, 9(2), 138-152.
- La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin, S., Andriani, R., Sos, S., & La Ode Farid Akhyar Hisanuddin, S. (2023). *Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting*. Deepublish.
- Munasef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta. Hal 47
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In Media. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. Hlm 81
- Pratama, M. Arszandi, dkk. 2015. *Menata kota melalui rencana detail tata ruang (RDTD)*, Yogyakarta. Andi.229.
- Wildayanti, W. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa= Implementation Of The Non-Cash Food Assistance (Bpnt) Program In Bontosunggu Village, Bajeng Sub-District, Gowa Regency (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.

Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:8)

JURNAL & SKRIPSI

Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, IZZmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 303-309.

Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 81-93.

Rahman, K. 2014. *Koordinasi Pembangunan Pedesaan di Wilayah Provinsi Riau*. *Jurnal Kajian Pemerintahan* 3 (2), 48-59.

Rahman, K. 2016. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Wedana. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 2 (2), 189-199.

S Maulidiah, 2016. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. Wedana. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 2 (2), 143-153.

S Maulidiah. 2017. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Wedana. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 3 (2), 337-344.

Saputri, I. T. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Covid-19 Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*).

Sulistyarini, T. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. *Ji@ P*, 10(2), 139-155.

Timmerman, M. I., Sambiran, S., & Pangemanan, S. (2021). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid- 19 Di Kelurahan Mahakeret Barat. *Governance*, 1(1).

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BAHTIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan merupakan kegiatan untuk melihat bagaimana kondisi atau keadaan kantor desa balai makam kecamatan bahtin solapan kabupaten bengkalis dan lingkungan masyarakat Desa balai makam.

A. Tujuan

Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai profil desa, serta masyarakat Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis .

B. Aspek yang diamati

| NO. | URAIAN | Ada/Tidak | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|------------|
| 1. | Alamat/Lokasi Desa balai makam Kecamatan bahtin solapan Kabupaten bengkalis | Ada | |
| 2. | Kantor Desa balai makam Kecamatan bahtin solapan Kabupaten bengkalis | Ada | |
| 3. | Peran perangkat desa dalam program BPNT | Ada | |

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan petunjuk peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti melampirkan daftar pertanyaan kepada informan yang sejalan dengan teori Edward III yang dimana kebijakan implementasi sangat ditentukan oleh isi teorinya. Dengan judul peneliti “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BAHTIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU” sebagai berikut:

Pertanyaan Wawancara Di Kantor Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

1. Bagaimana proses seleksi penyaluran Program BPNT di Desa Balai Makam ?
2. Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat Desa Balai Makam?
3. Mulai kapan program BPNT masuk di Desa Balai Makam?
4. Berapa jumlah bantuan yang diperoleh oleh warga penerima di Desa Balai Makam?
5. Apakah sumber daya di Desa Balai Makam sudah terpenuhi semenjak program BPNT disalurkan?
6. Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan BPNT di Desa Balai Makam?
7. Siapa saja yang menerima program bantuan BPNT di Desa Balai Makam?
8. Apa saja kendala atau masalah yang dialami selama Program BPNT di lakukan di Desa Balai Makam?
9. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada selama Program BPNT berlangsung di Desa Balai Makam?
10. Siapa saja yang mengurus program BPNT ini agar tersalurkan di Desa Balai Makam?

Lampiran 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Kepala Desa Balai Makam Sebagai Informan Kunci. (Bapak ade saputra, S.I.P)

Hari/Tanggal : Kamis, 13 juni 2024
Pukul : 09:10 WIB



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Balai Makam Sebagai Informan Tambahan

1. Ibu Ngadinem

Hari/Tanggal :Sabtu, 15 juni 2024

Pukul : 08:30 wib



2. Ibu Santini

Hari/Tanggal : senin,17 juni 2024

Pukul : 14:30 wib



Hari/Tanggal : selasa, 18 juni 2024
Pukul : 08:30 wib



Lampiran 4

INFORMAN PENELITIAN

1. Informan Kunci

- Nama : agus har
- Alamat : km.6 kualo mudo
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 58 tahun
- Jabatan : Kepala Desa

2. Informan Utama

- Nama : ade saputra, S.I.P
- Alamat : KM.6 KUALO MUDO
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 38
- Jabatan : Sekretaris Desa

3. Informan Tambahan

a). Informan Tambahan I

- Nama : NGADINEM
- Alamat : JALAN KARYA KM 7
- Jenis Kelamin : WANITA
- Usia : 55 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa BALAI MAKAM

b). Informan Tambahan II

- Nama : SANTINI
- Alamat : JALAN KARYA KM.7
- Jenis Kelamin : WANITA
- Usia : 48 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa BALAI MAKAM

c). Informan Tambahan III

- Nama : SUYETNO
- Alamat : JALAN KARYA KM.7
- Jenis Kelamin : PRIA
- Usia : 58 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa BALAI MAKAM

Lampiran 5

SURAT RISET LAPANGAN



Nomor : 1446/FIS.0/01.10/VI/2024
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 7 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mayang Puspita Sari
NIM : 208520007
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi di Desa Balai Makam Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN BALASAN DARI KANTOR DESA BALAI MAKAM



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
DESA BALAI MAKAM

Alamat : Jalan Pahlawan Tambusai Km. 5 Kulim Desa Balai Makam-Kode Pos 28785

Balai Makam, 14 Juni 2024

Nomor : 036/Pemdes-BM/VI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data dan Riset

Kepada Yth :
BAPAK/IBU DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 1446/FIS.0/01.10/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang kami terima pada tanggal 13 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset atas nama Mahasiswa :

Nama : **MAYANG PUSPTA**
NIM : 208520007
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan kegiatan Penelitian guna memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi di DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

a.n. **KEPALA DESA BALAI MAKAM**
KASUKSEJAHTERAAN

ADE SAPUTRA, S.I.P

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
DESA BALAI MAKAM

Alamat : Jalan Pahlawan Tampusai Km. 5 Kulim Desa Balai Makam-Kode Pos 28785

Balai Makam, 5 Juli 2024

Nomor : 01/Pemdes-BM/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data dan Riset

Kepada Yth. :
BAPAK/IBU DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSIAS MEDAN AREA
Di Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 1446/FIS.0/01.10/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang kami terima pada tanggal 13 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset atas nama Mahasiswa :

Nama : **MAYANG PUSPITA**
NIM : 208520007
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S1)**

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian guna memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi di DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DESA BALAI MAKAM
KABUPATEN BENGKALIS

PUTRA, S.I.P